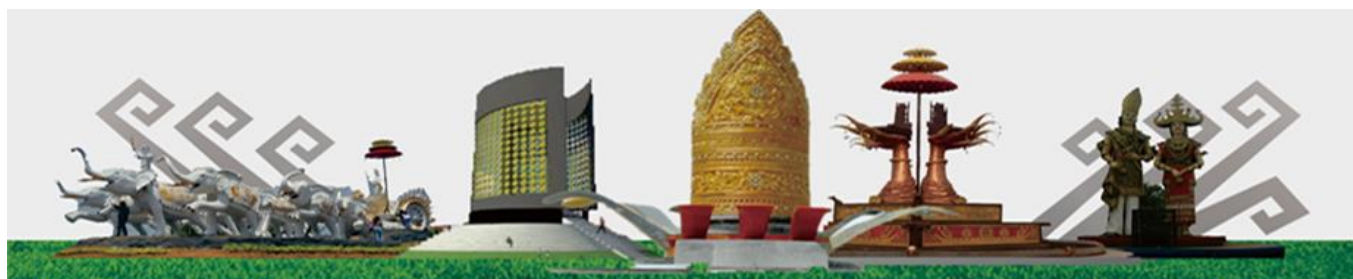




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN

Jalan Hi. Muchtar Gunung Sugih 34161, Telp, Faxes (0725) 5260643
Email: perindustriandinas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
NOMOR :800/ 030 /D.b.VI.22/I/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat (RENJA OPD) memuat arahan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten lampung Tengah ;
- l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Desember 2023;
- p. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan penjabaran Program dan kegiatan tahun 2025;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Perindustrian Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gunung Sugih
pada tanggal: Januari 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. Toherhan, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720527 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana program/kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan potensi dan berbagai kebutuhan, baik dari masyarakat maupun dunia usaha sebagai acuan dalam pembangunan di bidang industri yang berkelanjutan.

Sektor industri selama ini menjadi penggerak utama roda perekonomian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan struktur ekonomi daerah khususnya dalam menciptakan lapangan kerja perekonomian yang cukup berat. Demikian pula dunia usaha dihadapkan pada persaingan yang cukup tajam, namun disisi lain juga merupakan peluang apabila dapat memanfaatkannya. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi demikian antara lain dengan meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan industri yang saling mendukung.

Berdasarkan hal di atas, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Pembangunan sektor industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Demikian semoga RENJA ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah.

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah

Drs. Toherhan, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720527 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal OPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14

III. Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
3.3 Program dan Kegiatan	17

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V . Penutup

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian merupakan pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian merupakan lembaga teknis dalam struktur dan organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Perda No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Perindustrian sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Perindustrian yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perindustrian, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian.

Renja Dinas Perindustrian disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) , hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. RENJA Dinas Perindustrian memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian. RENJA Dinas Perindustrian pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA dan salah satu komponen dari Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Dinas Perindustrian, Proses penyusunan Renja dengan RKPD, Renstra dan tindak lanjut proses penyusunan APBD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Perindustrian merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Renja Dinas Perindustrian merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra, RPJMD, RAPBD dan RKA.

Industrialisasi pada hakekatnya adalah pembangunan suatu sistem yang sangat terkait mempunyai daya hidup dan mampu berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat.

Industri yang kuat dan maju hanya akan terwujud bila dilandaskan pada kemampuan teknologi yang kuat serta sistem ekonomi yang handal dengan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

Selain berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan produktifitas masyarakat, pembangunan industri juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan dan menghemat devisa, mendorong pembangunan ah, meningkatkan serta mengentaskan kemiskinan. Proses industrialisasi juga penting dalam mendukung berlangsungnya perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial yang lebih dinamis dan berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah didasarkan atas :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Desember 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Desember 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

- Untuk menetapkan program dan berbagai kegiatan yang strategis dalam setiap tahunnya.
- Untuk memberikan landasan kebijakan teknis dan merumuskan strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang industri kecil dan menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Bab I ini merupakan pendahuluan yang isinya mengemukakan latar belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan juga sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bab II ini merupakan gambaran Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Kabupaten Lampung Tengah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Tugas dan fungsi, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Bab III ini berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang dikaitkan dengan Renstra Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah serta rencana Program prioritas yang akan dilaksanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab IV berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang didalamnya terkait Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V merupakan Penutup, Kesimpulan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kinerja pembangunan sektor industri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2023 umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun ada beberapa sasaran yang belum mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa:

Sasaran pertama: Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil dan Menengah

Sasaran pertama telah membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan sektor industri. Pencapaian target Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah sebesar 80,1% lebih rendah dibandingkan tahun 2023, belum sesuai dengan target Renstra 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 pada Tabel.

**Tabel Capaian Kinerja Program Pembangunan
Urusan Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023				OPD Penanggung Jawab	Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase IKM yang telah memiliki standarisasi produk/bersertifikat/berizin	persen	3	3	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
	Jumlah IKM yang telah bersertifikasi halal	IKM	10	10	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
	Jumlah produk yang telah memiliki izin NIB,P-IRT	produk	100	123	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
2	Persentase kenaikan jumlah produksi IKM	persen	5	3,65	59	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023				OPD Penanggung Jawab	Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Jumlah Nilai Produksi	ton	582.305, 71 ton	81.822.487.963 ton/20.102.201 pcs/36.000.261 unit	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
	Jumlah IKM	kelompok	1.730	897	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dalam PDRB	persen	3	0,49%	1,6%	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
Capaian Rata-Rata					80,1%		

* Indikator kinerja merupakan indicator yang mengacu sasaran RPJMD, Sasaran OPD, Program dan Kegiatan

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Perindustrian Tahun 2022 – 2025 Kabupaten Lampung Tengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Urusan Pemerintah Pilihan									

3	31			Bidang Urusan Industri										
3	31	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	80%	97 %	80%	97%	121%	80%	275 %	344%	
3	31	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	3	6	2	2	100%	10	30	7,5%	
3	31	01	2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6	2	2	100	5	13	433	
3	31	01	2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300	
3	31	01	2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300	
3	31	01	2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	2	6	6	6	100	6	18	300	
3	31	01	2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	6	6	6	100	2	14	466	
3	31	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	300	
3	31	01	2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24	24	25	25	100	25	75	312	
3	31	01	2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	2	2	2	100	2	6	300	
3	31	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	6	5	5	100	5	15	214	
3	31	01	2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	1	1	100	1	10	125	
3	31	01	2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27	27	2	2	100	1	30	111	
3	31	01	2.01.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	48	4	4	100	4	56	116	
3	31	01	2.01.0 5	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	6	11	4	4	100	4	19	316	
3	31	01	2.01.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	170	24	24	100	12	206	286	
3	31	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	16	60	4	4	100	7	71	444	

3	31	01	2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	60	4	4	100	7	71	444	
3	31	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	12	12	12	100	12	36	1800	
3	31	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	12	12	100	12	36	1800	
3	31	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Negara	41	32	32	32	100	35	99		
3	31	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100	4	12	300	
3	31	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	27	27	27	100	30	84	233	
3	31	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	3	300	
3	31	02		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK	10	5%	5%						
3	31	02	2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dokumen RPIK Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	1	-	1						
3	31	02	2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	-	1	-			1	100	
3	31	02	2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	1	3	3	100	3	7	233	
3	31	02	2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	-	4	4	100	2	6	600	
3	31	02	2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	1	1	100	1	3	300	

3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Industri Yang memiliki Izin sesuai dengan ketentuan terhadap industri yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan	5%								
3	31	03	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Yang diterbitkan	10								
3	31	03	2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	1	-	-	
3	31	03	2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan data Perusahaan Industri yang ada di dalam SIINas terhadap jumlah total perusahaan	2%								
3	31	04	2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi industri yang ada di SIINas	120								
3	31	04	2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	1	1	100	1	3	300	
3	31	04	2.01.03	Sub Kegiatan Diseminasi , Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen diseminasi , Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	1	4	-	-	-	1	1	100	
3	31	04	2.01.04	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1	-	-	-	-	1	1	100	

[illegible]

Dari tabel T-C.29 terlihat bahwa realisasi target kinerja rata-rata mencapai 100%

Tabel Perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi industri kecil dan menengah Tahun 2023 – 2024

No	Uraian	Unit Usaha (IKM)		Tenaga Kerja (Orang)		Investasi (Rp. Milyar)		Nilai Produksi (ton/tahun)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	202
1.	IKAHH Besar Meneng h Kecil	38 7 2.842	65 170 1424	37.235 1.535 46.562	23.057 1.390 4.343	1.748.470.265.958 40.901.000.000 30.673.844.212	1.615.406.287.734 30.689.008.000 21.064.230.000	19.807,5 622.556 292.200	19.807,5 622.556 292.200
	Jumlah	2.887	1659	85.332	36.815	1.667.159.525.734		934.563	934.563
2.	ILMEA Besar Meneng h Kecil	5 1 1.270	14	40 2 634	336	5.400.000.000 - 12.629.095.000	1.445.378.400	- - 106.323	106.323
		1.276	14	676	336	18.029.095.000	1.445.378.400	106.323	106.323
	Sub Total								
	Besar	43	65	37.275	30.734	1.753.870.265.958	1.615.406.287.734	19.807	19.807
	Menenga h	8	170	1.537	1.738	40.901.000.000	30.689.008.000	622.556	622.556
	Kecil	4.112	1.372	47.196	4.679	43.302.939.212	22.634.430.000	292.200/102.323	292.200/102.323
	Total	4.163	1.673	86.008	27.816	1.838.074.205.170	1.502.667.646.811	955.568,5 ton / 116.324 unit	554.576.87/102.365 unit

Keterangan : IKAHH : Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
ILMEA : Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
Sumber Data : Dinas Perindustrian

Pada sasaran pertama efisiensi dari kegiatan-kegiatan telah berhasil dicapai. Hal ini tergambar dari nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh beberapa *input* tertentu, dimana persentase pencapaian target dari indikator-indikator kinerja tersebut berhasil dicapai diatas 80%. Demikian pula dengan tingkat kesesuaian antara beberapa indikator kinerja lainnya seperti hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dengan tujuan pada rencana strategik telah dicapai dengan efektif. Untuk implementasi dari kebijakan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pada rencana strategik telah berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan dari berbagai program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pertama telah dilaksanakan dengan lancar dan diharapkan dapat layak terus dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan pencapaian sasaran.

Sasaran kedua : *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan*

Seperti halnya sasaran-sasaran sebelumnya, sasaran kedua juga telah membawa perubahan berarti bagi pembangunan sektor industri. Hal ini terlihat dari pencapaian target penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional dinas sebesar 96,9 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, maka dalam laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program / kegiatan dinas yang berasal dari dana APBD Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Untuk pencapaian kinerja bidang Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) di tahun 2023 hanya melakukan pembinaan terhadap IKM binaan Dinas Perindustrian dan pameran Lampung Craft

dimana Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai penyelenggara. Pada tahun 2023 hibah uang yang diberikan kepada Dekranasda dipergunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelaksanaan Lampung Tengah Berwastra yang terlaksanakan dengan baik sehingga target kinerja tercapai.

- b. Bidang Monitoring dan Pendataan telah melakukan verifikasi teknis terhadap Perusahaan yang mengajukan ijin usaha dan melakukan pengawasan.
- c. Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) telah melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kepada IKM berupa sertifikasi halal dan bantuan alat produksi kepada IKM yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Tengah.

Kegiatan Fisik tahun ini berupa pengadaan peralatan computer lainnya sebanyak 4 buah . Sedangkan untuk realisasi keuangan dari anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung yaitu sebesar Rp. 7.3.. terdapat kenaikan sebesar 79,13 persen dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 5.871.519.395

Dalam merealisasikan rencana kerja tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai baik dari sisi pendidikan formal maupun kemampuan dan pengalaman teknis di bidang industri. Adapun jumlah SDM di Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

Tabel Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Pangkat						Jenis Kelamin		
	Gol/Ruang	a	b	c	d	Jml	Pria	Wanita	Jml

1.	IV	5		1	-	6	3	3	6
2.	III	3	2	4	4	13	8	5	13
3.	II		4		1	5	4	1	5
4.	I	-	-	-	-	0	-	-	0
Jumlah						24			24

Tabel Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggran 2023 berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal						
	Gol	Pasca Sarjana	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D III)	SLTA	SLTP	Jml
1.	IV	6		-	-	-	6
2.	III	2	11	-	-	-	13
3.	II	-	-	1	4	-	5
4.	I	-	-	-	-	-	-
Jumlah ..		8	11		5	-	24

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain gedung perkantoran sebanyak 1 (satu) buah terletak di Jl. H. Muchtar Komplek Perkantoran Gunung Sugih dan inventaris lain yang meliputi:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor	1 Unit
2.	Kendaraan roda 4	2 Unit
3.	Kendaraan roda 2	2 Unit
4.	Komputer	11 Unit
5.	Filling cabinet	9 Unit
6.	Meja kerja	16 Unit
7.	Kursi	48 Unit
8.	AC	9 Unit
9.	Lemari besi	6 Unit
10.	Laptop	9 Unit

11.	Printer	19 Unit
12.	Instalasi internet	1 Unit
13.	Genset	1 Unit
14.	Lemari kayu	2 Unit
15.	Papan pengumuman	2 Unit
16.	Kamera	2 Unit
17.	PinjerPrint	1 Unit
18.	Note book	5 Unit

Selanjutnya Kinerja pembangunan industri sampai dengan akhir tahun 2023, umumnya menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Hasil yang telah dicapai akan dijadikan parameter dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut dalam merumuskan program-program pembangunan di bidang industri.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah kepada dunia usaha dan masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diharapkan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kinerja pembangunan sektor industri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2023 umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun ada beberapa sasaran yang belum mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah terlihat pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah			5	5	5	5	145,78	22,22	22,24	22,24	Indikator ditetapkan Dinas Perindustrian Tahun 2024
2	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			60	65	65	70	100	100	100	100	Indikator ditetapkan Dinas Perindustrian Tahun 2024
3	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPIU) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			60	65	65	70	100	100	100	100	Indikator ditetapkan Dinas Perindustrian Tahun 2024
4	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan			60	65	65	70	100	100	100	100	Indikator ditetapkan Dinas Perindustrian Tahun 2024

	industri (IPKI)											

Berdasarkan Tabel hasil evaluasi kinerja pelayanan tersebut terlihat bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dapat mencapai target yang ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Masyarakat. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak dan memiliki tujuan dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan ruang lingkup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Isu - isu internal

- Terbatasnya ketersediaan tenaga fungsional khususnya tenaga penyuluh lapangan di bidang industri kecil dan menengah, minimal 4 (empat) kecamatan dibutuhkan 1 (satu) orang Tenaga Lapangan untuk pendataan.
- Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas rutin kantor dan tugas operasional ke lapangan.
- Terbatasnya ketersediaan buku-buku juklak/ juklis dan jurnal-jurnal di bidang industri kecil dan menengah (IKM).
- Keterbatasan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
- Pemuktahiran data industri belum maksimal pelaksanaannya.

2. Isu - isu eksternal di bidang industri:

- Industri kecil dan menengah

- 1) Kualitas produk industri kecil yang dihasilkan pengrajin belum siap bersaing dalam permintaan pasar.
- 2) Kerjasama/ kemitraan usaha-usaha kecil dengan industri besar belum berjalan secara maksimal.
- 3) Kualitas sumber daya manusia di bidang industri kecil dan menengah masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek teknis maupun dalam kemampuan manajerial.
- 4) Kesulitan modal usaha dan akses pasar dalam menjual produk-produk yang dihasilkan.
- 5) Dukungan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.
- 6) Iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif.

Dalam melakukan pelayanan Dinas Perindustrian dihadapkan pada tantangan seperti halnya penyebaran IKM di 28 kecamatan sehingga pada saat pendataan membutuhkan dukungan operasional. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap peningkatan kemampuan IKM dalam memproduksi juga kurang maksimal. Untuk mengatasi hal-hal tersebut ke depannya akan lebih ditingkatnya kegiatan bimbingan tekhis terhadap kemampuan IKM dalam memproduksi, dalam meningkatkan kemasan produk sehingga bisa bersaing di pasaran sehingga ekonomi pelaku industri meningkat.

Persiapan kawasan industri diharapkan bisa memberikan peluang bagi pelaku industri dalam mengembangkan usahanya, tentunya didukung oleh infrastuktur, sarana dan prasarana yang memadai.

Tingginya hasil pertanian bisa dijadikan sebagai bahan baku bagi IKM Olahan Pangan dalam meningkatkan hasil produksinya. Promosi hasil industri dilakukan di beberapa kegiatan pameran baik local maupun nasional, sehingga dapat mendatangkan investor bagi IKM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun rencana kegiatan Dinas Prindustrian Kabupaten Lampung Tengah mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dimulai dengan menetapkan

kebutuhan/prioritas dinas Perindustrian yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan prioritas kabupaten yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah.

Namun pada proses perencanaannya ada perbedaan pagu total di RENSTRA yang telah disusun Dinas Perindustrian sebagai rancangan awal RKPD dengan pagu analisis kebutuhan yang diberikan oleh Bappeda, karena terdapat sub kegiatan baru yang disesuaikan dengan numenklatur terbaru.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C-31.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan awal RKPD

No.	Program Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kegiatan	Tar get Cap aian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kegiatan	Targe t capai an	Pagu Indikatif (Rp)
I	PPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperin	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	80 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	80%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	B	195.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	B	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperin	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di susun	3	95.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di susun	2	25.101.000
1.2	Koordinasi dan	Disperin	Jumlah dokumen			Koordinasi	Jumlah	1	9.975.000,-

	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		
1.3	Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Disperin	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9.975.000,-
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ihktisar	Disperin	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	2	40.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ihktisar	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	6	16.893.00,-
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	60.000.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6	33.250.000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperin	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	3.025.000.000,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2	2.526.584.054,

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperin	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 org/bulan	2.550.000.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	3.243.929.095,
2.2	Penyediaan Administrasi Penyediaan Tugas ASN	Disperin	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	475.000.000,-	Penyediaan Administrasi Penyediaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8	466.320.000,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperin	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	30.000.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperin	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	5	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4	30.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperin	Jumlah Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	20.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Disperin	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	6.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.996.100
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperin	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	27	17.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	9.999.900
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperin	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	48	65.000.000	Penyediaan Bahan	Jumlah paket bahan logistik	4	88.027.100

			disediakan			Logistik Kantor	kantor yang disediakan		
4.4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Disperin	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		37.000.000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4	52.736.000
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperin	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	62.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-
4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperin	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	360	122.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	369.925.000
4.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Disperin	Jumlah surat yang diarsipkan	160	35.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah surat yang diarsipkan	-	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperin	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	14	140.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	7	83.000.000
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	14	140.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	7	83.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	49.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	69.120.000

6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	49.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	69.120.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperin	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Negara	37	170.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Negara	32	125.575.000
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperin	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	94.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	86.340.000
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperin	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	32	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	27	18.310.000
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperin	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara	1	54.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara	1	20.925.000
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperin	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK	5	2.096.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK	4	3.795.142.000
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Disperin	Jumlah Dokumen RPIK yang Telah Ditetapkan	1	2.096.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen RPIK yang	1	3.795.142.000

	Industri Kabupaten/Kota		dengan PERDA			Pembanguna n Industri Kabupaten/K ota	Telah Ditetapkan dengan PERDA		
1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperin	Jumlah dokumen rencana Pembangunan industri	1	441.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Ko ta	Jumlah dokumen rencana Pembangunan industri	1	80.000.000
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperin	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	265.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	44.999.800
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	Disperin	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkroni sasi dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industri	1	1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sin kronisasi dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industri	3	2.325.141.500
1.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperin	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	400	170.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	1.345.000.700
1.8	Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Disperin		-	--	Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Ko		-	-

						ta			
III	PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI	Disperin	Persentase Peningkatan	4%		PROGRAM PENGENDA LIAN IZIN USAHA INDUSTRI		1%	
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperin	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota yang diterbitkan		
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan	Disperin	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan			
1.4	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standa r Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperin				Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/St andar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis			

	yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS) RBA)					Resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS) RBA)			
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperin				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
1.	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperin				Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Disperin	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	1 dokumen	54.900.200

1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota	Disperin	Jumlah dokumen hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota	1 dokumen		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota			
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 dokumen					

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisi kebutuhan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah . Rekapitulasi perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat perbedaan kebutuhan anggaran dimana dibutuhkan anggaran sebesar RP. 3.556.215.154, dengan anggaran yang disediakan capaian program ini adalah 96,50% dalam kategori capaian sangat tinggi.
2. Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdapat perbedaan kebutuhan anggaran dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.795.142.000, dengan anggaran yang disediakan capaian program ini adalah 97,45% dalam kategori capaian sangat tinggi.
3. Pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdapat penurunan anggaran yang sangat signifikan akibat adanya PMK 212 tahun 2023 dimana hanya tersedia anggaran sebesar RP. 54. 900.200,dengan anggaran yang disediakan capaian program ini adalah 92,38% dalam kategori capaian sangat tinggi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026 dan program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, termasuk dari kelompok masyarakat atau pelaku IKM yang mengusulkan melalui Musrenbang Kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disampaikan pada tabel.

Tabel.T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2025

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3		4	5
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperin			
1.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperin		15 Unit 15 Sertifikasi halal	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperin	1 dok	15 Unit	Bantuan peralatan/mesin kepada IKM

1.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperin	15	15 sertifikasi halal	Fasilitasi Sertifikat Halal
-------	--	----------	----	-------------------------	-----------------------------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi, dan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dengan mengacu pada Rencana Kerja Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah bersinerga dengan dokumen perencanaan lainnya, baik RKPD Kabupaten Lampung Tengah maupun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

Di dalam Pembangunan sektor industry terdapat Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN) Tahun 2020 - 2024 . Perpres ini ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian Pembangunan industry tahap II tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industry sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih maju.

Selanjutnya RIPIN menjadi acuan bagi Gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) yang kemudian dijadikan acuan bagi kabupaten/kota untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Tengah tahun 2022 – 2042 mengacu kepada RIPIN 2025 – 2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2016 – 2035 dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menyatakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Misi Bupati Lampung Tengah yang terkait dengan Dinas Perindustrian yaitu misi ke 3 (Tiga) “Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan” dengan demikian tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah ” Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah” dengan target sasaran 5%.

Maka ditetapkan sasaran pembangunan dan pengembangan industri sebagai berikut:

1. Meningkatnya Fasilitas penunjang kesekretariatan
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

4. Meningkatnya Daya saing Industri Kecil dan Menengah
5. Meningkatnya Kontribusi industri non migas

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, RENJA tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program Pembangunan yang ditetapkan dalam RENJA Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan pagu indikatif sementara APBD Tahun 2024, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh Masyarakat luas .

Pelaksanaan kegiatan RENJA Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang di Dinas Perindustrian. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi Masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Sejalan dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat 4 (Empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Adapun Program Kerja/kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Perkiraan Anggaran Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE					Urusan/ Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	
3	31				Perindustrian														
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		97%	80%	80%		Lamteng	APBD					Dinas Perindustrian	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku						Lamteng	APBD						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2	2	2	45.000.000	Lamteng	APBD				45.500.000		

						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD		1	1	1	10.000.000	Lamteng	APBD					11.000.000	
						Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1	1	1	10.000.000	Lamteng	APBD					11.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IHKTisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD		6	6	6	25.000.000	Lamteng	APBD					26.000.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah		6	6	6	60.000.000	Lamteng	APBD					61.500.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah						Lamteng	APBD						
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					3.243.929.095	Lamteng	APBD					3.243.929.095	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					500.000.000	Lamteng	APBD					500.000.000	

						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin					Lamteng	APBD						
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					25.000.000	Lamteng	APBD					25.000.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah					Lamteng	APBD						
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan					10.000.000	Lamteng	APBD					12.000.000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					9.000.000	Lamteng	APBD					10.000.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan					75.000.000	Lamteng	APBD					90.000.000
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					35.000.000	Lamteng	APBD					40.000.000

				Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					270.000.000	Lamteng	APBD					300.000.000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan						Lamteng	APBD						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					220.000.000	Lamteng	APBD					225.000.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah						Lamteng	APBD						
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan					69.120.000	Lamteng	APBD					69.120.000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan						Lamteng	APBD						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak					90.000.000	Lamteng	APBD					90.000.000	

				Dinas Operasional atau Lapangan	dan perizinannya													
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				25.000.000	Lamteng	APBD					28.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				100.000.000	Lamteng	APBD					105.000.000		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK					Lamteng	APBD							
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA					Lamteng	APBD							
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				153.617.200	Lamteng	APBD					158.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri				235.434.301	Lamteng	APBD					240.500.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan				360.991.400	Lamteng	APBD					375.000.000		

					Prasarana Industri	pembangunan sarana dan prasarana industri												
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.339.224.000	Lamteng	APBD					1.340.000.000	
					Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				140.500.000	Lamteng	APBD					142.000.000	
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan					Lamteng	APBD						
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Jumlah izin usaha yang diterbitkan					Lamteng	APBD						

					(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				190.472.800	Lamteng	APBD					194.000.000	
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				63.000.000	Lamteng	APBD					65.000.0008	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Persentase Peningkatan data Perusahaan					Lamteng	APBD						

				INDUSTRI NASIONAL	Industri yang ada di dalam SIINas terhadap jumlah total perusahaan													
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi industri yang ada di SIINas						Lamteng	APBD						
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					80.000.000	Lamteng	APBD					85.000.000	
				Diseminasi , Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen Diseminasi , Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					187.217.030	Lamteng	APBD					188.000.000	

					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					65.000.000	Lamteng	APBD					70.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan kerangka pendanaan yang berdasarkan pada rencana awal penyusunan RKPD dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2025

No					Urusan/Bid. Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				
3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN		Lampung Tengah		6.872.646.785
3	31				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		80%	
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-			

						undangan yang berlaku			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2	45.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	25.000.000
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.479.070.054
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN			500.000.000

					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi			25.000.000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			9.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			75.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			35.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			423.617.200
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			220.000.000

					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			69.120.000
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			90.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100.000.000
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK			
					Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK Yang Telah Ditetapan dengan PERDA			
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			

					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		235.434.301
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		360.991.400
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1.339.224.000
					Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		140.500.000
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan		
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Jumlah izin usaha yang diterbitkan		

					Kabupaten/Kota				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			190.472.800
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			63.000.000